

**MODELLING ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM MENILAI
KEWAJARAN BELANJA PADA
PEMERINTAHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020**

Tri Inka Sari¹, Arliansyah², Nur Afni Yunita³, Murhaban⁴

tri.180420056@mhs.unimal.ac.id¹, arliansyah@unimal.ac.id²,

nurafni.yunita@unimal.ac.id³, murhaban@unimal.ac.id⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Bukit Indah, Blangpulo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Standar Belanja dalam menilai kewajaran belanja pada pemerintahan kota Lhokseumawe, dan membantu mengembangkan hubungan formal tersebut dengan menggunakan perilaku biaya dan konsep biaya berdasarkan aktivitas yang disebut sebagai analisis standar pengeluaran. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder yakni laporan realisasi anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, penyajian data, ferivikasi/kesimpulan. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kota Lhokseumawe mengenai Analisis standar belanja ini dilakukan dengan menginventarisir data sampel kegiatan pada tahun 2020 di 34 SKPK.

Kata kunci: Analisis Standar Belanja, Anggaran pendapatan dan Belanja daerah

Abstract

The shift from traditional budgeting systems to performance-based budgeting in the public sector in recent decades requires a formal link between the inputs consumed and the results achieved. This study aims to determine the Analysis of Expenditure Standards in assessing the fairness of spending in the Lhokseumawe city government, and to help develop this formal relationship by using cost behavior and the concept of activity-based costing which is known as expenditure standard analysis. This research is included in the type of descriptive research with a qualitative approach. The data collection method uses secondary data sources, namely budget realization reports and budget implementation documents obtained in ready-made form, which are collected and processed by other parties. The data analysis method in this research is data reduction, namely summarizing, selecting the main things, presenting data, and making conclusions/conclusions. The results of research conducted at the Regional Financial Management Agency of Lhokseumawe City regarding the analysis of expenditure standards was carried out by taking an inventory of sample data for activities in 2020 in 34 SKPKs

Keywords: Expenditure Standard Analysis, Regional Revenue and Expenditure Budget

PENDAHULUAN

Reformasi keuangan daerah telah memberi peluang kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri karena disadari bahwa yang lebih memahami kondisi dan persoalan suatu daerah adalah (pemerintah) daerah itu sendiri. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur keuangannya sendiri. Wewenang yang besar tersebut disertai dengan pertanggungjawaban yang besar juga, dana wajib dikelola dengan baik dalam mendukung tujuan yang ingin dicapai. Untuk melihat seberapa baik dan benarnya pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan mempunyai dua tujuan yaitu untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan dan mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan seluruh asset yang diterima (Suhaedi, 2019)

Salah satu pengeluaran daerah yang menjadi wewenang terhadap pemerintahan daerah yaitu belanja daerah, belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah merupakan bagian dari pengeluaran daerah, dimana pengeluaran tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung (Gorahe, 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 298 ayat (3) menegaskan bahwa belanja daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bencana Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah membawa perubahan besar terhadap kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah di seluruh dunia, Salah satunya sebagian besar anggaran yang seharusnya untuk belanja daerah disalurkan untuk penanganan pandemi, sehingga banyak anggaran belanja tidak terealisasi sesuai apa yang dianggarkan (kompas.com, 2021). Adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang harus diikuti oleh pemerintah daerah (top-down policy), menyebabkan kebijakan anggaran daerah yang telah disepakati sebelumnya oleh kepala daerah dan DPRD dan telah ditetapkan dengan Perda tentang APBD mengalami penyesuaian dan perubahan yang sangat signifikan. Pengalokasian sumber daya tidak lagi berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD, tetapi berdasarkan refocusing dan realokasi.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi Covid-19 dan dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam konteks Analisis Standar Belanja (ASB) Penelitian terdahulu yang mengkaji penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) belum banyak dilakukan sementara pemerintah daerah dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja perlu melengkapi instrumen Analisis Standar Belanja (ASB) dalam penyusunan anggaran. Penelitian mengenai evaluasi, implementasi model Analisis Standar Belanja (ASB) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Putra (2012) mengevaluasi penganggaran daerah dengan Analisis Standar Belanja (ASB) di Kabupaten Ngawi, penelitian Fatikhah (2013) membuat model Analisis Standar Belanja (ASB) pemerintah kota Batu, dan penelitian Amaliah (2015) membuat model Analisis Standar Belanja (ASB) pada pemerintah kabupaten Bulukumba.

Atas dasar penelitian terdahulu maka peneliti melakukan penelitian mengenai kajian pembuatan model Analisis Standar Belanja (ASB) pada beberapa kegiatan yang ada di SKPK

pemerintah kota Lhokseumawe tahun 2020. Konsep Analisis Standar Belanja (ASB) masih sangat jarang diterapkan pada pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia karena masih sangat sedikit referensi yang mengacu pada konsep Analisis Standar Belanja (ASB) sehingga masih banyak daerah yang belum mengetahui proses penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB). Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, hal ini menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Modelling Analisis Standar Belanja Dalam Menilai Kewajaran Belanja Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe 2020"**.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Event Study

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event Study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat (Elga, 2022). Hubungan teori event study dengan penelitian ini ialah adanya kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi sistem keuangan dan kebijakan pengelolaan keuangan Negara dan daerah, peristiwa tersebut yaitu pandemi covid-19 yang menyebabkan perubahan anggaran, karna pada saat pandemi covid-19 banyak diperlukan bantuan-bantuan dalam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia dan minimalisir dampak pandemi Covid-19 untuk kestabilan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karna itu pemerintah mengambil kebijakan merefocusing anggaran dalam menghadapi ancaman dari peristiwa pandemic covid-19 yang melanda seluruh daerah yang ada di Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rasyidah Nadir, Muhammad Ridwan Arif Dan Fatmawati2 Januari (2020) adalah terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek pada Pemerintahan kota Lhokseumawe. Sedangkan pada penelitian Rasyidah Nadir, Muhammad Ridwan Arif Dan Fatmawati2 Januari (2020) mengambil objek Penelitian Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo Di Sulawesi Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh ulfah nas, muhammad su'un, fadhiah nasaruddin (2018), perbedaan penelitian ini dengan peneliti ulfah nas terletak pada objeknya dilakukan di dinas kesehatan kabupaten sigai sedang penelitian yang saya ajukan objeknya di pemerintahan kota Lhokseumawe.

Penelitian yang dilakukan oleh Rasyidah Nadir, Muhammad Ridwan Arif, Fatmawati, Sabri Wahab (2018), perbedaan penelitian ini Penelitian Ini Dilakukan Untuk Menganalisis Standart Belanja Terhadap Kebijakan Pimpinan Daerah di kabupaten wojo Sedangkan Pada Penelitian Saya Menganalisis Kewajaran Belanja Yang Di Lakukan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

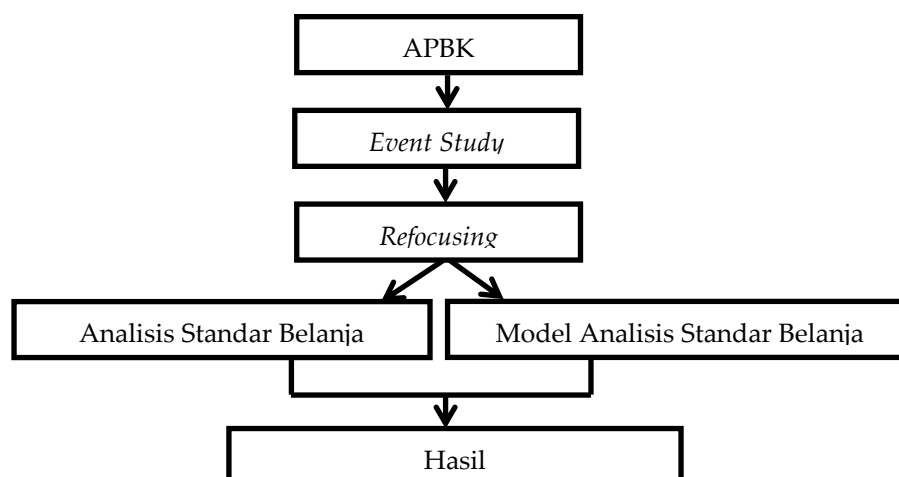
Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan Suhaedi (2019), perbedaan penelitian ini Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2014 Sampai Tahun 2018 Sedang Penelitian Yang Untuk Menilai Kewajaran Belanja Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh dilakukan Alfred Labi (2019), perbedaan penelitian ini Untuk Menganalisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Pada Tahun 2013 Dan 2015. Sedangkan Penelitian Saya Untuk Menganalisis Standart Kewajaran Belanja Pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Pemerintah kota Lhokseumawe, yang berlokasi di Jl. Merdeka, Kuta Blang, Banda Sakti, Lhokseumawe-Aceh. Yang menjadi objek penelitian ini adalah standar belanja .

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penulis menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus, yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal Dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Data sekunder pada penelitian ini yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 di BPKD kota Lhokseumawe, data Realisasi Anggaran 2020, serta data Standar Satuan Biaya.

Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data dari lapangan ,peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi langsung
Menurut (Riyanto, 2010) observasi merupakan metode pengumpulan data yang memakai pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi ialah penelitian menggunakan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung dan tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.
2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi-informasi berdasarkan sumber data, untuk memperoleh data RKA/DPA dan Standar satuan biaya.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu tahap pengumpulan data, tahap penggolongan kelompok Analisis Standar Belanja (ASB), dan tahap pengolahan data Menjadi Analisis Standar Belanja (ASB). Tahap pertama pengumpulan data, Tahap kedua merupakan tahap penggolongan kelompok Analisis Standar Belanja (ASB) dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Tahap ketiga merupakan tahap pengolahan data Menjadi Analisis Standar Belanja (ASB), yang dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasi yang terjadi di pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Adapun pembahasan dari hasil penelitian yang akan dijelaskan penulis bahwasanya Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) melalui beberapa tahapan.

1 Tahap pertama dimulai dengan mengumpulkan data sekunder

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK tahun anggaran 2020 dan Realisasi Anggaran 2020 berupa kegiatan eksisting pemerintah daerah yang disesuaikan dengan data kegiatan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Data DPA 2020 dan data realisasi anggaran pada pemerintah Lhokseumawe diperoleh dari keseluruhan SKPK sejumlah 34 (tiga puluh empat) SKPK yang terdiri dari 17 dinas, 6 badan, 6 sekretariat, 1 inspektorat, dan 4 kecamatan. Dari 34 SKPK diidentifikasi setiap kegiatan tentang input dan outputnya. Tahapan dalam pengumpulan data ini antara lain menginventarisir data seluruh kegiatan pada tahun sebelumnya pada seluruh SKPK. Hal yang harus diperhatikan ialah memastikan bahwa data belanja dalam setiap kegiatan di tahun tersebut tersedia lengkap. Data belanja sebaiknya menggunakan data realisasi belanja. Namun bila data tidak tersedia, maka digunakan data dalam APBK.

2 Pengelompokan Kelompok Analisis Standar Belanja (ASB)

Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah proses Analisis Standar Belanja (ASB). Data kegiatan dan belanja per SKPK yang didapatkan harus dikelompokkan dan digolongkan berdasarkan kelompok-kelompok belanja-belanja tertentu. Setiap kelompok Analisis Standar Belanja (ASB) minimal terdiri dari 3 (tiga) sampel kegiatan. Semakin banyak sampel kegiatan yang digunakan dalam sebuah kelompok Analisis Standar Belanja (ASB) akan semakin baik. Pengelompokan data dari seluruh SKPK merupakan kelompok sampel kegiatan lintas SKPK. Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki 34 SKPK dan pengelompokan dilakukan dengan menggabungkan data sampel kegiatan yang serupa yang berasal dari 2 SKPK atau lebih. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan seluruh atau nyaris seluruh SKPK cenderung kegiatan rutin atau pun kegiatan yang tidak melekat hanya pada SKPK tertentu. Pengelompokan ini sering disebut dengan Analisis Standar Belanja (ASB) umum.

Dasar pengelompokan belanja yang dilakukan adalah:

- a. Memiliki kesamaan sifat atau proses terjadinya belanja tersebut.
- b. Memiliki output yang sama.
- c. Memiliki unsur pemicu (cost driver) yang sama.

Cost Driver merupakan Landasan penting untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas adalah dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driver untuk setiap aktivitas. Pemahaman yang

tidak tepat atas pemicu akan mengakibatkan ketidaktepatan pada pengklasifikasian biaya. Sehingga menimbulkan dampak dalam mengambil keputusan. Cost driver merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead.

Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktifitas. Di sektor swasta, terdapat dua jenis cost driver, yaitu:

- 1 Cost Driver berdasarkan unit membebankan biaya overhead pada produk melalui penggunaan tarif overhead tunggal oleh seluruh departemen.
- 2 Cost Driver berdasarkan non unit merupakan faktor-faktor penyebab selain unit yang menjelaskan konsumsi overhead. Contoh cost driver berdasarkan unit pada perusahaan jasa adalah luas lantai, jumlah kamar yang tersedia dan sebagainya.

Dalam pemilihan cost driver yang tepat ada 3 (tiga) faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1 Kemudahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemilihan cost driver (cost of measurement). Cost driver yang membutuhkan biaya pengukuran lebih rendah akan dipilih.
- 2 Korelasi antara konsumsi aktivitas yang diterangkan oleh cost driver terpilih dengan konsumsi aktivitas sesungguhnya 20 tingkat korelasi (degree of correlation). Cost driver yang memiliki korelasi tinggi akan dipilih.
- 3 Perilaku yang disebabkan oleh cost driver terpilih (behavior effect). Cost driver yang menyebabkan perilaku yang diinginkan yang akan dipilih.

Berikut merupakan hasil inventarisasi data-data sampel kegiatan serupa dan sejenis yang sudah disusun berdasarkan kelompok Analisis Standar Belanja (ASB) yang dikelompokkan per kegiatan pada lintas SKPK (ASB Umum) dalam hal ini adalah:

- 1 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- 2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Non Pegawai;
- 3 Penyusunan, Penelitian, Pengkajian, Dokumen dan Pelaporan;
- 4 Penyelenggaraan Event.

3. Pengolahan Data pembentukan Analisis Standar Belanja (ASB)

Sebelum melakukan pengolahan data disarankan untuk melakukan Penginputan Data sebagai berikut, Nama sampel merupakan nama kegiatan yang termasuk sampel dalam kelompok Analisis Standar Belanja (ASB). Tahun adalah tahun kegiatan tersebut terjadi. Rincian objek belanja merupakan pos belanja-belanja yang dianggarkan pada level kode rekening rincian objek dalam kegiatan serta persentasenya dalam total anggaran kegiatan. Belanja-belanja yang serupa bisa digabungkan menjadi satu nama belanja.

Sedangkan dalam proses pengolahan data pembentukan Analisis Standar Belanja (ASB) Metode yang digunakan dalam pengelolaan data ialah dengan menggunakan statistika inferensi yaitu *student-t distribution* dimana data yang digunakan <30 dan standar deviasi tidak diketahui.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab IV, dapat diambil kesimpulan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Proses Analisa Standar Belanja (ASB) ini dilakukan dalam proses penganggaran yaitu ketika menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK.

Analisis Standar Belanja (ASB) dipemerintah Kota Lhokseumawe ini dilakukan dengan menginventarisir data sampel kegiatan pada tahun 2020 di 34 SKPK. Kegiatan yang dilakukan Analisa Standar Belanja (ASB) merupakan kegiatan yang dilaksanakan seluruh atau nyaris seluruh SKPK cenderung kegiatan rutin ataupun kegiatan yang tidak melekat hanya pada SKPK tertentu atau disebut dengan Analisa Standar Belanja (ASB) umum.

Dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengetahui kewajaran anggaran maka apabila anggaran kegiatan pada DPA masing-masing SKPK tersebut berada di antara batas atas dan bawah maka anggaran belanja kegiatan tersebut wajar. Namun bila lebih kecil dari batas bawah maka anggarannya underfinance dan sebaliknya bila lebih besar dari batas atas maka anggarannya overfinance atau anggaran yang digunakan terlalu tinggi jika anggaran yang berada diantara batas belanja minimum dan maksimum berarti anggaran dikatakan wajar.

Bagi pemerintah kota Lhokseumawe, sebaiknya menggunakan Analisa Standar Belanja (ASB) dalam proses penganggaran untuk menilai tingkat kewajaran besaran anggaran, hal ini diperlukan untuk menghindari kemungkinan overfinance yang dapat membebani anggaran maupun underfinance yang dapat menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan maksimal karena kurangnya anggaran.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah :

- 1 Ada baiknya untuk menggabungkan sistem Analisa Standar Belanja (ASB) kedalam sistem yang ada misalkan ke sistem penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah, agar mempermudah dalam pembuatan model Analisa Standar Belanja (ASB) nya.
- 2 Ada baiknya untuk membakukan cara perhitungan rincian anggaran belanja, misalkan untuk belanja bimbingan teknis harus jelas jumlah orang atau peserta dan jumlah hari pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Bali, P. N. (2013). **Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Kabupaten Jembrana I Nyoman Darmayasa** Jurusan Akuntansi , Politeknik Negeri Bali Jalan Kampus Bukit Jimbaran , Kuta Selatan. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke-2 Pemberlakuan Otonomi Daerah Dan Desentralis. 17–18.
- Bawimbang, P. M. I., Rorong, I. P. F., Siwu, H. F. D., Langsung, P. B., Tidak, B., Dan, L., Bawimbang, P. M. I., Rorong, I. P. F., & Siwu, H. F. D. (2021). **Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Dikota Manado** The Effect Of Direct Expenditure , Indirect Spending And General Allocation Funds Against Poverty In Manado City Jurnal Emba Vol . 9 No . 2 April 2021 , Hal . 523 - 531. 9(2), 523–531.
- Dewantari, N. M. S., & .(2021). **Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014**. Hita Akuntansi Dan. 32, 20–41. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1488>
- Djefris, D., Rosalina, E., Ahmad, A. W., & Eka, A. (2021). **Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman**. 16(2), 50–67.
- Elga, R., Murni, S., Tulung, J. E., Manajemen, J., Ekonomi, F., Elga, R., Murni, S., & Tulung, J. E. (2022). **Reaksi pasar modal terhadap peristiwa sebelum dan sesudah pengumuman covid-19 di indonesia** (event study pada indeks lq45) capital market reaction to events before and after the covid-19 announcement in indonesia (event study on lq45 index companies) jurnal 10(1), 1052–1060.
- Fathony, A. A., & Rahayu, Y. T. (2021). **Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah**. 12, 18–34.
- Gorahe, I., Masinambow, V., & Engka, D. (2014). **Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Sulawesi Utara**. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14(3), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/5650>

- Kemenkeu. (2020). Menkeu Paparkan Hasil Refocusing, Dan Realokasi Anggaran Di Dpr. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-realokasi-anggaran-di-dpr/>
- kompas.com. (2021). **Sebagian Besar Anggaran Belanja Kabupaten Bekasi** Pada Bali, P. N. (2013). Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Kabupaten Jembrana I Nyoman Darmayasa Jurusan Akuntansi , Politeknik Negeri Bali Jalan Kampus Bukit Jimbaran , Kuta Selatan. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke-2 Pemberlakuan Otonomi Daerah Dan Desentralis. 17–18.
- Labi, A. (2019). **Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten pulau morotai tahun anggaran 2013 - 2015**. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 5(1), 1355–1370.
- Lestari, P. I., & Shara, Y. (2021). **Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**. 2(1), 345–359.
- Lhokseumawe, D. (2020). **Pemko Lhokseumawe Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid-19. DPRK Lhokseumawe**. <https://dprk-lhokseumawekota.go.id/pemko-lhokseumawe-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19/>
- Meryana, Junaidi, & K.S, A. F. (2021). **Perbandingan Reaksi Investor Pada Industri Beresiko Rendah Dan Beresiko Tinggi Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19**. E-Jra, 09(02), 47–57.
- Nadir, R., Arif, M. R., & Fatmawati, F. (2020). **Modelling Analisis Standar Belanja Dalam Kewajaran Anggaran (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Di Sulawesi Selatan)**. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 11(2), 197–205. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1580.197-205>
- Nadir, R., Arif, M. R., & Wahab, S. (2018). **Modelling Analisis Standar Belanja Terhadap Kebijakan Pimpinan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Wajo)**. 2018, 261–266.
- Nas, U., Su'un, M., & Nasaruddin, F. (2020). **Analisis Standar Belanja Dan Kewajaran Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten sinjai**. Bongaya Journal For Research in Accounting, 3(3), 76–82.
- Pangerapan, Sonny, Lontaan, Indra, Ch. (2016). **Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014**. L.C .Lontaan.S Pangerapan. Analisis Belanja Daerah, 4(1), 898–906.
- Purwanti, E., & Elien Noviyant. (2021). **Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018**. Endang Purwanti 1 , Elien Noviyanti 2. 14(2), 1–12.
- Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran itu Apa? (2020). <https://bungko.desa.id/2020/09/refocusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran-itu-apa/>
- Reza Nanda, & Kuala, D. (2016). **Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah**. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 1, No(1), 327–340.
- Riyanto. (2010). **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**. Granit

- Society, C. P. (2016). **Penyusunan Analisis Standar Belanja Sebagai Pedoman Penerapan Value For Money Dalam Penganggaran Pada Pemerintah Daerah: Kasus Belanja Kegiatan Pelatihan.** 65(22), 1–10. <https://doi.org/10.7498/aps.65.226401>
- Sugiyono. (2019). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D** (25th ed.). Alfabeta.
- Suhaedi, W. (2019). **Analisis Belanja Daerah.** *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63. <http://aksioma.unram.ac.id/index.php/aksioma/article/view/82>
- Wahyuningsih, R., Hutajulu, D. M., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2022). **Analisis Determinasi Belanja Daerah (Studi Kasus Kota / Kabupaten Jawa Tengah Periode 2018 - 2019).** 03(2), 67–84.